

IMPLEMENTASI APLIKASI E-SPPT PBB-P2 TAHUN 2023 DI KECAMATAN GAMPENGREJO KABUPATEN KEDIRI

Pravda Izvestia Dyah Arsyana, Nunik Retno Herawati

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Departemen Politik dan Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kode Pos 50139
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405
Laman <https://fisip.undip.ac.id/> E-mail fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Peningkatan efisiensi dalam pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dipengaruhi oleh kinerja pemerintah dalam memungut pajak dan masyarakat dalam membayar pajak dengan tertib. Pemerintah Kabupaten Kediri bekerja sama dengan Bapenda Kabupaten Kediri mengimplementasikan aplikasi E-SPPT PBB-P2 untuk memfasilitasi pembayaran pajak bumi dan bangunan secara digital. Penelitian ini menganalisis implementasi aplikasi tersebut menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan data yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan analisis dokumen berdasarkan teori implementasi kebijakan Grindle.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa E-SPPT PBB-P2 telah meningkatkan efisiensi pembayaran PBB dan memberikan manfaat, seperti kemudahan akses bagi masyarakat. Namun, beberapa aspek seperti adaptasi teknologi masyarakat dan jumlah petugas pajak yang terbatas masih menjadi tantangan. Selain itu, koordinasi antara Bapenda dan perangkat kecamatan memerlukan peningkatan untuk mendukung implementasi kebijakan yang lebih efektif. Dari enam indikator dalam isi kebijakan, empat indikator telah berjalan dengan baik. Dari tiga indikator dalam lingkungan implementasi, satu indikator berjalan dengan baik.

Untuk meningkatkan keberhasilan implementasi, pemerintah perlu memperluas sosialisasi aplikasi, memberikan pelatihan teknologi bagi masyarakat dan petugas pajak, serta meningkatkan dukungan teknis dan infrastruktur. Dengan langkah ini, diharapkan seluruh pengguna aplikasi dapat memanfaatkan layanan digital secara maksimal dan efisiensi pengelolaan PBB terus meningkat.

Kata Kunci: implementasi kebijakan; digitalisasi pajak daerah; pajak bumi dan bangunan; E-SPPT PBB-P2

ABSTRACT

The efficiency improvement in the implementation of Land and Building Tax (PBB) is influenced by the government's performance in tax collection and the public's compliance in timely payment. The Kediri Regency Government, in collaboration with the Regional Revenue Agency (Bapenda), implemented the E-SPPT PBB-P2 application to facilitate digital payment of land and building taxes. This study aims to analyze the implementation of the application using a descriptive qualitative approach, with data collected through in-depth interviews and document analysis, based on Grindle's policy implementation theory.

The findings show that E-SPPT PBB-P2 has improved tax payment efficiency and provided benefits such as easy access for the public. However, challenges remain, including technological adaptation among users and the limited number of tax officers. Additionally, coordination between Bapenda and subdistrict officials requires enhancement to support more effective policy implementation. Of the six indicators in policy content, four have been successfully implemented. Among the three indicators in the implementation environment, one indicator has shown effective results.

To enhance the success of implementation, the government should expand application outreach, provide technological training for the public and tax officers, and strengthen technical and infrastructural support. These steps are expected to ensure optimal utilization of digital services by all users and improve PBB management efficiency.

Keywords: policy implementation; regional tax digitalization; land and building tax; E-SPPT PBB-P2

PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memainkan peran penting dalam mendukung pembangunan daerah, baik dalam aspek infrastruktur maupun pelayanan publik. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjadi salah satu sumber PAD yang signifikan, karena pajak ini dipungut langsung dari masyarakat berdasarkan kepemilikan dan pemanfaatan tanah dan bangunan. Pengelolaan PBB yang efektif tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan PAD, tetapi juga sebagai wujud tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan publik yang memadai.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, pemerintah didorong untuk mengintegrasikan sistem digital dalam pengelolaan pajak termasuk PBB. Dalam penelitian ini, Pemerintah Kabupaten Kediri, bekerja sama dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), meluncurkan aplikasi E-SPPT PBB-P2. Hal ini didukung oleh Keputusan Bupati Kediri Nomor HK.04.112.418.08.2023 tentang Penetapan Pelaksanaan Aplikasi E-SPPT PBB-P2 di Kabupaten Kediri yang menjadi dasar hukum penerapan aplikasi tersebut.

Salah satu wilayah yang berhasil memanfaatkan aplikasi E-SPPT PBB-P2 untuk meningkatkan realisasi pembayaran PBB yaitu Kecamatan Gampengrejo. Berdasarkan data dari Bapenda Kabupaten Kediri, kecamatan ini

mencatat tingkat realisasi pembayaran tertinggi di kabupaten, dengan persentase lebih dari 49% pada pertengahan 2023. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi digital melalui E-SPPT PBB-P2 telah memberikan dampak positif. Namun, masih terdapat sejumlah tantangan seperti adaptasi masyarakat terhadap teknologi baru dan keterbatasan infrastruktur serta sumber daya manusia.

Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan implementasi aplikasi E-SPPT PBB-P2 Tahun 2023 di Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pegawai Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), perangkat kecamatan, dan wajib pajak, serta analisis dokumen terkait implementasi E-SPPT PBB-P2 yang diperoleh dari laporan faktual dari Bapenda maupun jurnal pendukung. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN

Analisis Berdasarkan Isi Kebijakan Teori Grindle

Pemerintah daerah telah mempertimbangkan bagaimana kebijakan tentang pelayanan E-SPPT PBB-P2 dapat diterima oleh kelompok sasaran. Pemerintah daerah memberikan edukasi secara

langsung dengan mendatangi masyarakat atau melalui kegiatan sosialisasi di kantor desa, kecamatan, atau wilayah yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

Salah satu masyarakat pengguna aplikasi E-SPPT PBB-P2 menyampaikan bahwa informasi terkait penggunaan aplikasi ini dapat diakses dengan mudah, termasuk melalui *platform* media sosial seperti Instagram resmi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Media sosial tersebut menyediakan panduan lengkap, termasuk tutorial yang memudahkan masyarakat memahami proses pembayaran pajak secara digital.

Tipe manfaat dari kebijakan E-SPPT PBB-P2 yang dirasakan baik dari sisi pemerintah maupun masyarakat yaitu kemudahan dan efisiensi dalam pemungutan dan pembayaran pajak. E-SPPT PBB-P2 memberikan pemerintah keleluasaan dalam melaporkan keuangan terkait pajak daerah menjadi lebih transparan dan meningkatkan akuntabilitas dalam mengelola anggaran.

Dengan adanya catatan pembayaran pajak secara digital pun memudahkan akses dan pemeriksaan yang dapat dilakukan kapan saja sehingga mengurangi potensi penyelewengan atau korupsi dari pihak pemerintah itu sendiri. Pemerintah daerah menyebutkan bahwa digitalisasi dalam pembayaran pajak ini menjadikan pekerjaan juga lebih efisien karena peralihan dari

manual yang masih menggunakan kertas ke digital melalui E-SPPT PBB-P2.

Perubahan dari sistem manual ke digital melalui implementasi aplikasi E-SPPT PBB-P2 telah membawa dampak signifikan pada berbagai aspek, terutama dalam meningkatkan efisiensi administrasi pajak. Dengan aplikasi ini, proses yang sebelumnya membutuhkan banyak tahapan manual, seperti pencetakan dan distribusi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), kini dapat dilakukan secara lebih cepat dan terstruktur melalui platform digital.

Namun, tantangan besar yang dihadapi adalah literasi digital masyarakat, terutama di wilayah pedesaan. Tidak semua masyarakat memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk menggunakan perangkat digital atau memahami aplikasi berbasis teknologi. Banyak masyarakat yang masih bergantung pada bantuan petugas pajak atau perangkat desa untuk mengakses aplikasi ini.

Dalam tahap perencanaan kebijakan, pemerintah daerah tentu saja sudah memiliki gambaran apa yang harus dilaksanakan. Melihat lamanya proses pengelolaan pembayaran PBB dan kurang efektifnya pelaksanaan pembayaran PBB secara manual membuat pemerintah daerah mewujudkan E-SPPT PBB-P2. Hal ini diawali dengan pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan tenaga kerja yang dapat mendesain UI dimana profesi ini

memastikan sebuah tampilan aplikasi atau *website* sudah sesuai dengan tujuan kebijakan yang dikembangkan oleh pemerintah. Pada profesi desain UI E-SPPT PBB-P2, tenaga kerja yang memiliki tugas tersebut adalah Bidang Perencanaan dan Pengendalian (P2) di Bapenda Kabupaten Kediri. Salah satu tugas dari P2 ini yaitu perumusan rancangan peraturan daerah, peraturan Bupati, dan keputusan Bupati tentang Pendapatan Asli Daerah.

Sistem E-SPPT PBB-P2 ini harus terhubung dengan database yang dikelola oleh Bapenda, terutama pada Bidang Perencanaan dan Pengendalian yang bertugas mengurus aplikasi E-SPPT PBB-P2 sehingga data wajib pajak dan SPPT dapat diakses dengan mudah.

Dari implementasi ini, E-SPPT PBB-P2 membawa efisiensi yang sangat besar dalam hal waktu dan biaya. Penerbitan SPPT dan pencatatan pembayaran bisa dilakukan lebih cepat karena sistem digital yang digunakan secara otomatis. Selain itu, ada pun peningkatan kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak dapat melihat tagihan mereka melalui alat elektronik yang mereka punya.

Pemerintah Kecamatan Gampengrejo memiliki akses langsung ke sistem E-SPPT di tingkat kecamatan, yang memungkinkan mereka untuk memantau secara real-time status pembayaran pajak dari para wajib pajak di wilayahnya. Dengan akses ini, pihak kecamatan dapat

mengetahui siapa saja yang telah memenuhi kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta mengidentifikasi masyarakat yang belum melakukan pembayaran.

Dalam penerapan E-SPPT PBB-P2, Bapenda membutuhkan tenaga kerja yang terlatih dalam operasional aplikasi dan penanganan data digital untuk disebar di setiap kecamatan, termasuk penempatan di Kecamatan Gampengrejo. Pelatihan berkelanjutan dan peningkatan kapasitas pegawai menjadi prioritas agar mereka dapat menjalankan sistem secara optimal dan memberikan pelayanan yang responsif.

Namun, meskipun tenaga dan fasilitas pendukung telah disediakan, jumlah sumber daya manusia yang tersedia saat ini masih dianggap belum memadai. Kasir di Kecamatan Gampengrejo harus merangkap tugas di Kecamatan Purwoasri, yang menyebabkan keterbatasan waktu dan tenaga dalam melayani wajib pajak di dua wilayah. Hal ini membuat pelayanan di Kecamatan Gampengrejo belum bisa berjalan maksimal, karena kasir harus membagi fokus dan jadwal kerjanya antara dua kecamatan

Analisis Berdasarkan Lingkungan Implementasi Teori Grindle

Penyamaan visi dan misi dalam mewujudkan kebijakan E-SPPT PBB-P2 ini menjadi poin penting agar pelaksanaan

implementasi tidak terhambat. Dari sisi internal, Bapenda Kabupaten Kediri juga mendorong kerja sama antar divisi untuk memastikan pelayanan terbaik bagi wajib pajak.

Setiap bidang memiliki peran khusus yang mendukung Bapenda Kabupaten Kediri dalam memfasilitasi pembayaran pajak. Dengan kolaborasi ini, Bapenda mampu memberikan layanan yang lebih terintegrasi dan responsif terhadap kebutuhan wajib pajak. Dengan akses langsung ke sistem E-SPPT PBB-P2, pemerintah kecamatan juga dapat memantau status pembayaran pajak secara *real-time*, memastikan kelancaran administrasi, serta mengidentifikasi masyarakat yang belum membayar pajak.

Koordinasi yang intensif antara Bapenda Kabupaten Kediri, pemerintah kecamatan, dan perangkat desa ini menjadi langkah yang efektif untuk mengurangi hambatan komunikasi dan memperlancar implementasi kebijakan di lapangan. Dalam hal ini, Kecamatan Gampengrejo tidak hanya berperan sebagai perantara antara Bapenda dan masyarakat, tetapi juga sebagai fasilitator utama yang mendukung perangkat desa agar dapat menyosialisasikan kebijakan ini secara optimal.

Masih rendahnya tingkat pengenalan dan pemahaman masyarakat tentang sistem pembayaran PBB secara daring, termasuk di wilayah pedesaan, ini membuktikan bahwa masih adanya literasi digital yang rendah pada wajib pajak. Masih banyak

masyarakat yang belum mengenal prosedur dan manfaat pembayaran pajak secara digital. Meskipun sebagian kecil masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang teknologi informasi telah memanfaatkan metode pembayaran online ini, jumlahnya masih relatif terbatas.

Pemerintah Kecamatan Gampengrejo menyadari bahwa keterbatasan literasi digital di kalangan masyarakat desa dapat menghambat penerapan kebijakan secara maksimal, sehingga diperlukan pendekatan khusus dan pendampingan lebih lanjut untuk membantu masyarakat beradaptasi dengan sistem baru ini.

KESIMPULAN

Dilihat dari isi kebijakan, kelompok sasaran telah terakomodasi dengan sosialisasi dari pemerintah yang melibatkan masyarakat secara langsung. Kemudahan dan efisiensi dalam pemungutan dan pembayaran pajak telah dirasakan oleh pihak pemerintah maupun sebagian besar masyarakat karena adanya peningkatan jumlah wajib pajak. Namun, tingkat realisasi pembayaran pajak menurun dari tahun sebelumnya karena tantangan dari masyarakat yang masih kurang familiar dengan teknologi. Selain itu, sumber daya yang disediakan oleh pemerintah untuk melayani wajib pajak juga masih belum memadai karena seorang petugas pajak masih merangkap tugas di dua kecamatan.

Implementasi ini didasari oleh kebijakan dan landasan

hukum, termasuk Keputusan Bupati Kediri tentang digitalisasi layanan publik melalui E-SPPT PBB-P2 yang sejalan dengan upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak lokal. Penerapan E-SPPT PBB-P2 di Kabupaten Kediri mendorong efisiensi dan akuntabilitas dalam proses administrasi pajak.

Dilihat dari lingkungan implementasi, peran pemerintah dalam mendukung implementasi E-SPPT PBB-P2 masih harus ditingkatkan untuk menghadapi masyarakat yang belum mengenal teknologi dengan baik. Hal ini berguna untuk meningkatkan kesiapan masyarakat dalam beradaptasi dengan sistem baru serta kendala infrastruktur digital yang membatasi akses di beberapa wilayah pedesaan.

SARAN

Saran yang dapat diberikan penulis terkait dengan implementasi aplikasi E-SPPT PBB-P2 Tahun 2023 di Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri yaitu:

1. Menambahkan fitur notifikasi otomatis untuk mengingatkan wajib pajak yang belum membayar PBB, guna meningkatkan kepatuhan pajak.
2. Melakukan sosialisasi lebih intensif melalui media sosial dan tatap muka, terutama kepada masyarakat yang kurang familiar dengan teknologi.
3. Menambah jumlah petugas Bapenda di kecamatan agar tidak terjadi rangkap tugas, sehingga proses pengelolaan pajak lebih efisien.
4. Menyelenggarakan pelatihan intensif dan seminar terkait pengoperasian teknologi pajak bagi petugas pajak, pegawai Bapenda, serta aparat kecamatan dan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Andrianto, N. (2007). *Good E-Government*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Chandra, C. A., Sabijono, H., & Runtu, T. (2020). Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Gorontalo Tahun 2016-2018. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 290-298.
- Dea. (2022, Maret 25). Luncurkan Aplikasi e-SPPT untuk Bayar PBB-P2. Retrieved Mei 18, 2023, from Jawa Pos: Radar Kediri: <https://radarkediri.jawapos.com/politik-pemerintahan/25/03/2022/1-uncurkan-aplikasi-e-sppt-untuk-bayar-pbb-p2/>
- Devi dkk, S. M. (2021). Analisis Pemungutan Pajak Bumi

dan Bangunan (PBB) di
UPTD Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Kediri.
*UBHARA Accounting
Journal*, 375-383.

Mardoni, A. (2020). *Pajak Bumi
dan Bangunan Area
Perdesaan dan Perkotaan
(Tinjauan Implementasi
Kebijakan Perspektif Ilmu
Administrasi)*. Surabaya:
Scopindo Media Pustaka.

Winarno, B. (2012). *Kebijakan
Publik: Teori, Prose, dan
Studi Kasus*. Yogyakarta:
Caps.